

Skripsi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

DI DESA ROMPEGADING KECAMATAN CENRANA

KABUPATEN MAROS

SARTIKA

NomorStambuk :10561 04534 12



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
DI DESA ROMPEGADING KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

SARTIKA

Nomor Stambuk : 105610453412

PROGRAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Sartika

Nomor Stambuk : 105610453412

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

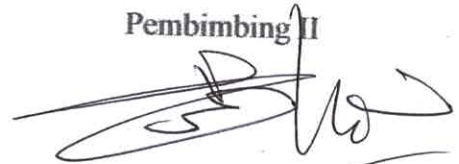
Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Myani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
4. Nasrulhaq, S.Sos, M.PA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini

NamaMahasiswa : SARTIKA

NomorStambuk : 105610453412

Program Studi : IlmuAdministrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 januari 2018

Yang Menyatakan



SARTIKA

ABSTRAK

SARTIKA: (2018) Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (dibimbing oleh Musliha Karim dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, dan untuk mengetahui apa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan kart indonesia pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif, tipe penelitian ini adalah studi kasus, dan analisis data yang digunakan adalah mendeskriptif kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini mulai dari Kepala Desa Rompegading, Staf Dinas Pendidikan Daerah, Staf Desa Rompegading, Kepala Sekolah SDN Padangalla, Guru SDN Padangngalla dan Masyarakat yang menerima kartu indonesia pintar, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 10 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia (KIP) Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros berjalan cukup baik dan lancar, Namun dari hasil penelitian menemukan beberapa kekurangan yang perlu di perhatikan untuk di perbaiki yaitu penyaluran dana tidak tepat waktu dan sulitnya pengawasan dana yang di kelola oleh orang tua siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun faktor pendukung implementasi KIP adalah sosialisasi yang di sampaikan oleh Kepala Desa dan Kepala Sekolah di sertai dengan peralatan yang memadai, dan dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima kebijakan KIP. Sedangkan faktor penghambat implementasi KIP adalah kurangnya tenaga pelaksana dari kebijakan yang mengakibatkan pelaporan dana kurang maksimal dan kurangnya perhatian dari pelaksana tingkat atas sehingga informasi yang di berikan kepada masyarakat tentang penyaluran dana sering terlambat.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Indonesia Pintar.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala nikmat iman, islam, kesempatan serta kekuatan yang telah Allah *Subhanawata'ala* sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* serta salam peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah *Shallallahu'alaihiwassalam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini berjudul "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) DiDesa Rompegading Kecamatan Cenrana KabupatenMaros".Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dra. Hj Musliha Karim, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Orang Tua tercinta, Baharuddin dan Darmawati yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, doa yang tiada tara untuk peneliti sehingga peneliti bisa seperti sekarang.
4. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Penasehat Akademik.
5. Desa Rompegading dan Masyarakat sekitar yang telah menerima untuk melakukan penelitian dan senantiasa melayani serta menyediakan data yang dibutuhkan.
6. Keluarga tercinta, kakak, adik Sarah Amelia dan Tante Herlina. Yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materil.
7. Sahabat - sahabat tersayang Innah, Dila, Cica, Tika, Kartika, Ainun, Marwah, Masny, Ayu Athifa, Irma, Yuyu, Selfi, Lidya yang senantiasa sabar menghadapi peneliti dan tetap memberikan doa dan semangat.
8. Teman-teman kelas D angkatan 2012 jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah sama-sama berjuang selama kuliah.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 Januari 2018

Penulis

SARTIKA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah..... | iii |
| Abstrak..... | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan..... | 9 |
| B. Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Implementasi..... | 12 |
| C. Kebijakan Publik..... | 20 |
| D. Kartu Indonesia Pintar..... | 23 |
| E. Kerangka Pikir..... | 28 |
| F. Fokus Penelitian..... | 29 |
| G. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 29 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Waktu Dan Lokasi Penelitian..... | 31 |
| B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian..... | 31 |
| C. Sumber Data..... | 32 |
| D. Informan Penelitian..... | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| F. Teknik Analisi Data..... | 35 |
| G. Keabsahan Data..... | 36 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| B. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros | |
| 1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi | 42 |
| 2. Perilaku Implementor Tingkat Bawah | 47 |
| 3. Perilaku Kelompok Sasaran | 54 |
| C. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. | |
| 1. Faktor yang mendukung dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) | |
| a. Sosialisasi | 58 |
| b. Dukungan dari Masyarakat | 62 |
| 2. Faktor Yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) | |
| a. Sikap Agen Pelaksana | 66 |
| b. Komunikasi Agen Pelaksana | 70 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu Arif Rohman (2009).

Menginterpretasikan dan menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu capaian seperti program yang telah dipilah sedemikian rupa sebelum adanya penetapan. Melakukan interpretasi tersebut berkenaan dengan mendefinisikan atau mengatur metode-metode untuk melaksanakan program. Program yang memberi peluang kepada pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki banyak bentuk dan macam, salah satunya terkait kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembuatan ataupun pengimplementasian perlu dilandasi oleh kebijakan yang pro atau sesuai bukan hanya untuk satu daerah namun untuk daerah-daerah lainnya

yang sesuai sehingga tidak terjadi kesenjangan akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif atau sudut pandang dalam proses implementasi kebijakan atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Maka dari itu dalam implementasi suatu program khususnya yang melibatkan organisasi/instansi pemerintah maka fokus analisa implementasi kebijakan akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat keputusan serta dalam upaya memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Pembangunan dalam suatu daerah khususnya terkait kesejahteraan yang menjadi titik fokus pemerintah yaitu pemenuhan kewajiban dasar yaitu salah satunya pembangunan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan. Pendidikan yang merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan. Selain itu, pendidikan merupakan instrument yang sangat menentukan dalam memberikan kontribusi kemajuan suatu bangsa dalam membangun watak bangsa. Dalam perencanaan pembangunan ini perlu didukung oleh suatu kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Proses menelaah suatu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat luas akan menjadi gambaran awal dari

pelaksanaan kebijakan tersebut. Bukan hanya itu, mengevaluasi kebijakan publik dapat dibuat pada saat merumuskan kebijakan, artinya sebelum diimplementasikan dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut Suharto (2014).

Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu kebijakan yang sudah di implementasikan yaitu pendidikan gratis yang bertujuan agar tidak adanya anak yang berusia pendidikan dasar dan menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai tingkat taraf hidup dan penggolongan sosial untuk menikmati pendidikan.

Mengenai suatu kebijakan yang bersifat pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan yang dilandasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan visi pemerintah dan rencana kerja pemerintah yang disebutkan diatas dan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu; Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk penerima Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk penerima Program Indonesia Sehat. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa salah satu program atau kebijakan pemerintah yaitu penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pembangunan pendidikan yang berkualitas berperan penting untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Dalam tahun 2015, upaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas antara lain akan dilaksanakan melalui wajib belajar 12 tahun, yaitu untuk memenuhi hak seluruh penduduk terhadap pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Namun, pada kebijakan yang sudah memihak kepada kesejahteraan masyarakat belum dapat

dikatakan dapat mengurangi beban masyarakat dalam dunia pendidikan dikarenakan implementasi dari suatu kebijakan juga menjadi hal penting sebagai faktor keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata. Hadi Supeno (2010) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yaitu melepaskan rakyat dari kemelaratan, sekarang telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanya menjadi milik mereka orang-orang yang mempunyai banyak uang dan mereka yang berasal dari keluarga menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji dalam kehidupan sehari – hari hanyalah sebuah cita – cita yang kita tidak tahu sampai kapan akan merata pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Muhammad Saroni (2013) menyebutkan bahwa para pejabat politik di tingkat pusat maupun daerah masih berfokus pada kepentingan mereka sendiri sehingga kepentingan masyarakat miskin hanya menjadi amanat tugas mereka tidak di laksanakan dengan baik. Sehingga masyarakat yang kurang mampu terpaksa harus berjuang sendiri berhadapan dengan kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di depan mereka. Masalah pembiayaan selalu menjadi masalah bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah kebawah. Masyarakat kelompok lapisan ini harus rela menjadi penonton di pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk duduk di kursi penonton yang nyaman. Hal ini tentu saja

menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi. Banyaknya siswa yang berhenti bersekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya dan lebih memilih untuk bekerja membuat angka putus sekolah semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi adalah masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu secara materi terdaftar sebagai penerima KIP serta masih ada juga siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, penerimaan dananya tidak tepat pada waktunya. Padahal pemerintah mengeluarkan program ini adalah untuk siswa/masyarakat yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi bantuan dana KIP adalah untuk membeli buku dan alat sekolah, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi kesekolah, uang saku siswa, biaya kursus/les tambahan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan disekolah. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung di terima di bank, yang mengelola orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

Desa Rompegading merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang menerima bantuan dana KIP. Kantor Desa Rompegading (2017) terdapat 46 anak sekolah yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang terdiri dari 32 SD, 12 SMP dan 2 SMA, Masing – masing menerima bantuan dana KIP sebesar Rp. 1.000.000,00pertahun untuk SMA, Rp. 750.000,00 pertahun, untuk SMP dan Rp. 450.000,00 untuk SD, dana tersebut diberikan

pertahun(per dua semester). Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera yang dikirim dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia (KIP) Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang ada, maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, bahwa dengan hasil penelitian ini masyarakat lebih mengerti tentang Kartu Indonesia pintar.
- b. Bagi pemerintah daerah, bahwa hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Maros dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut keberlangsungan program KIP ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarmo (2002) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan jika di pandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan.

Implementasi di artikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang – undangan di tetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (tangible). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan – tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah. Di samping itu implementasi juga menyangkut masalah pencipta suatu policy delivery system atau sistem penghantaran/penyerahan kebijakan. Implementasi juga di artikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya di sampaikan dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak di atasi, tujuan yang hendak di capai serta cara untuk memecahkannya Effend Sofian (2001).

Implementasi kebijakan adalah proses menjalankan keputusan kebijakan. Implementasi juga merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu Arif Rohman

(2009). Dimana pelaksanaan implementasi ini dibentuk melalui pengorganisasian sehingga membentuk suatu tugas-tugas yang berbeda antar personel untuk menghasilkan kebijakan yang direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Selanjutnya Cleaves yang di kutip dalam wahab (2008) implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”.

Syaukani dkk (2004) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005), makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang sebenarnya terjadi

setelah suatu program dinyatakan telah berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik dilaksanakan oleh badan pemerintah yang melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*) maupun memberikan pelayanan. Untuk kebijakan sederhana, dalam implementasi hanya satu badan yang dilibatkan yaitu berfungsi sebagai pelaksana.

Implementasi kebijakan akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor adalah semua aspek yang sangat berpengaruh, dan karenanya menentukan kinerja implementasi yang perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan yang sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri Nugroho (2003). Suatu pelaksanaan sangat penting dalam suatu pemerintahan dan mekanisme operasional kebijakan tidak hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan masalah - masalah politik seperti konflik keputusan, dan tanggapan kelompok sasaran Abidin(2002).

Syukur dalam Surmayadi (2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: adanya program atau kebijakan yang di

laksanakan, target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan di tetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan dan untur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Perbuatan atau tindakan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perbuatan atau perilaku mereka tidak sesuai dengan kehendak pemerintah atau negara maka kebijakan public tersebut tidak dapat disebut efektif Sutarto (2006).

B. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan akan ditentukan dari banyak vfaktor dan variabel, dan masing- masing variabel tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

1. Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn, dalam AG Subarsono (2005) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran dari suatu kebijakan harus terukur dan jelas agar kebijakan berjalan baik, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah antar organisasi.
- b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya yang non-manusia.

- c. Hubungan antar Organisasi. Di dalam berbagai program, implementasi sebuah program memerlukan koordinasi dan dukungan dengan instalasi lain. Maka dari itu, perlu kerjasama dan koordinasi antar instansi untuk keberhasilan dalam suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Mencakup norma-norma, birokrasi dan pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi yang baik sangat memengaruhi implementasi dari suatu program.
- e. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yaitu akan mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

2. Teori Implementasi George C. Edwards III

Joko Widodo (2006) teori implementasi dari Model Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Adapun empat faktor atau variabel tersebut meliputi faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Faktor komunikasi. Informasi kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaksana agar dapat memahami dan mengetahui apa yang menjadi target dari kebijakan tersebut yaitu isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang seharusnya dilakukan dan dipersiapkan dalam pelaksanaan kebijakan publik agar apa yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Komunikasi kebijakan

mempunyai beberapa dimensi, yaitu dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi.

- b. Sumberdaya. Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan yang penting di dalam suatu implementasi kebijakan. Selanjutnya Edward III menyatakan bahwa bagaimanapun konsisten dan jelasnya ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan tersebut, Van Horn & Van Matter (1974) juga menyatakan bahwa sumberdaya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan seperti tanah, peralatan, gedung dan suku cadang lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Disposisi. Keberhasilan implementasi kebijakan yang menjadi penentu bukan hanya sejauh mana para pelaku kebijakan tau apa yang harus dilakukan dan jagu mampu untuk melakukannya, akan tetapi kemauan para pelaku kebijakan tersebut juga menjadi disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga diri mereka. Mereka akan mengetahui bahwa kebijakan akan lebih menguntungkan bagi organisasi dan juga dirinya, jika mereka mempunyai pengetahuan (*cognitive*) yang cukup dan mereka

sangat mendalam dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman dari kebijakan tersebut akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itu yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi tingkat tinggi menurut Edward III (1980) Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi dapat diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dan kecenderungan para pelaksana (*implementors*) dalam melaksanakan kebijakan tersebut Edward III (1980).

- d. Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan masih belum efektif karena ada ketidak efisien dari struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek- aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan dengan organisasi luar dan sebagainya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya suatu komunikasi, yaitu para pelaksana kebijakan bisa mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksi nya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

3. Menurut Teori Hogwood dan Gun

Dua ahli yang bernama Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Solichin (2008) ini oleh para ahli ilmu politik di kelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan '*the top down approach*'. Menurut kedua ahli tersebut, agar dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perfect implementation), di butuhkan banyak syarat. Syarat-syarat tersebut adalah Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius, untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia kebijakan yang akan di implementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal, hubungan kausalitas tersebut harusnya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, hubungan saling ketergantungan harus kecil, adanya kesepakatan terhadap tujuan dan pemahaman yang mendalam, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang dapat menuntut dan juga mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model implementasi kebijakan mengenai keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Gridle dalam Nugroho (2003) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*), ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan dilakukan implementasi kebijakan.

Mengembangkan model *top-down* telah dilakukan oleh dua pakar kebijakan, Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Sujianto (2008) Model mereka yang disebut dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) mereka berargumen bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: Standardan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktivitas pengamatan dan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik. Selanjutnya pandangan Soren C Winter dalam Peters and Pierre (2003) mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah Kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran bukan hanya pengaruh yang diberikan terhadap dampak kebijakan tetapi juga memberikan pengaruh pada kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang timbul baik maka kinerjanya juga baik demikian juga sebaliknya jika dampak yang timbul tidak baik maka kinerjanya juga akan buruk. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon yang positif dan negative dari masyarakat baik itu mendukung ataupun tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Perbuatan atau tindakan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan public tidaklah efektif Sutarto(2006). Implementasi suatu kebijakan juga tidak lepas dari suatu kegagalan dimana terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Menurut Bambang sunggono dalam Putra (2001), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan dari dalam maupun luar dari kebijakan tersebut. *Ketiga*, di dalam melaksanakan suatu kebijakan kadang menimbulkan kekurangan-kekurangan. *Keempat*, kegagalan dari implementasi suatu kebijakan publik terjadi juga karena sebab yang lain yaitu karena kurangnya sumber daya pembantu, misalnya waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan

Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga biasanya juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Struktur organisasi pelaksana dapat timbul masalah apabila pembagian tanggung jawab dan wewenang kurang sesuai dengan pembagian tugas atau pembatasan-pembatasan yang tidak jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya kepada kebijakan-kebijakan yang kontroversial di dalam implementasinya akan lebih banyak mendapat warga masyarakat yang menolaknya Huda (2011).

Perspektif atau sudut pandang mengenai pelaksanaan sebagian besar kebijakan public atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah, dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni:

a. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan

- b. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan,dan
- c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kerlompok sasaran (target group).

C. Kebijakan Publik

Kamus Besar Indonesia Edisi keempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya (1) selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir. (2) pandai bercakap cakap, petah lidah. Sedangkan menurut menurut Mustopadidjaja dalam Tahir (2014) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah. Anderson dalam Tahir (2014) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya William Dunn dalam Sahya Anggara (2014) menjelaskan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Saling kebergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh system masalah.
- b. Subjektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefenisikan, diklarifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi.
- c. Sifat bantuan. Masalah kebijakan di pahami, dipertahankan, dan diubah secara social.

- d. Dinamika masalah kebijakan, cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang di tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Berbagai konsep kebijakan public yang dikemukakan oleh para ahli sangat berpariatif bentuknya. Hessel Nogi S. (2005) kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu yang memperlihatkan tiga tampilan dalam cakupan studinya yaitu menentukan arah umum yang harus di tempuh untuk mengelola isu-isu yang ada ditengah masyarakat, menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi birokrasi public ini. Kemampuan analisis kebijakan publik secara proporsional dengan memperhatikan semua stakeholders jarang terlibat. Kepekaan ini perlu diasah melalui pendalaman kasus-kasus kebijakan publik yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan memperhatikan factor rasionalitas serta wacana public secara kontekstual. Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*. yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi Nugroho R (2004).

Kartasasmita dalam Edy Sutrisno (2009) mengatakan bahwa kebijakan adalah upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang di lakukan, apa yang menyebabkan atau mempengaruhi, apa pengaruh dan dampak dari kebijakan public tersebut. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami

sebagai kebijakan public, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Demikian pemahaman kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai aktor public, terkait dengan kebijakan public maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar Aminullah dalam Muhammadi (2001) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan menurut Ndraha (2003) bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Hamidi (2011) Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi nyata. Dari semua bentuk biaya

dan manfaat kebijakan baik yang secara langsung maupun yang akan datang, seharusnya diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah yang memberikan sedikit informasi mengenai dampak kebijakan publik karena untuk menentukan hal tersebut perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

D. Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Rini Septiani Astuti (2016) Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab sekolah.

1. Pengertian

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai kepada siswa dalam usia sekolah (6-21 tahun) yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan dari pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang kemudian disebut PIP adalah pemberian bantuan dana yang berupa uang tunai dari pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa yang orang tuanya berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam masalah pembiayaan pendidikannya. Program Indonesia Pintar,

yang lalu disebut KIP adalah kartu yang di berikan untuk anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi, direktorat jendral terkait, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasar dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bberat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

1. Tujuan

Program Indonesia Pintar merupakan satu dari beberapa program nasional yang mempunyai tujuan untuk:

- a. Meningkatkan angka partisipasi baik pendidikan dasar maupun menengah
- b. Meningkatkan pendidikan yang dilihat dengan penurunan angka siswa yang putus sekolah dan angka melanjutkan.
- c. Menurunnya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, Antara masyarakat kaya dan miskin, antara laki – laki dan perempuan, antara wilayah di kota dan di desa maupun antar daerah lainnya.

- d. Meningkatkan kesiapan siswa dari pendidikan menengah untuk bekerja atau lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi.

2. Sasaran

Sasaran KIP adalah anak usia 6 sampai 21 tahun yang merupakan :

- a. Masyarakat yang menerima BSM 2014 dan mempunyai KPS
- b. Siswa dari keluarga yang mempunyai KPS/KKS/KIP belum menerima BSM 2014
- c. Siswa yang berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS
- d. Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dan dari panti asuhan
- e. Siswa yang sedang terkena bencana alam
- f. Anak usia 6 sampai 21 tahun yang tidak sekolah (Drop Out) yang ingin kembali untuk bersekolah
- g. Siswa/anak dari keluarga miskin yang terancam tidak dapat melanjutkan sekolah atau siswa dengan beberapa pertimbangan khusus yang lain, misalnya: terdapat kelainan fisik, di daerah konflik, terkena musibah, orang tuanya di PHK, dari keluarga terpidana berada di dalam LAPAS, mempunyai saudara lebih dari 3 orang yang tinggal serumah, siswa SMK yang melanjutkan studi keahlian dalam bidang; pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pelayaran/kemaritiman, siswa yang kursus maupun satuan pendidikan nonformal lainnya. Kecuali sasaran yang terdaftar pada SMK bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan pelayaran/kemaritiman, sasaran nomor 1 dan nomor 2 merupakan sasaran yang di prioritaskan.

3. Besaran dana

Besaran dana KIP yang di berikan kepada peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar (SD). Tahun pelajaran 2015/2016 Peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp. 450.000,00.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tahun pelajaran 2015/2016 peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp. 750.000,00.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA). Tahun pelajaran 2015/2016 peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp. 1.000.000,00.
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tahun pelajaran 2015/2016 peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp. 1.000.000,00.

4. Pemanfaatan Dana

Program KIP diberikan berupa biaya pribadi siswa sehingga dapat melanjutkan pendidikannya hingga selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan tersebut di tujukan secara langsung kepada siswa agar bermanfaat sebagai berikut:

- a. membeli buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa kesekolah
- d. Uang jajan siswa disekolah
- e. Biaya kursus /les tambahan

5. Mekanisme pengambilan dana

Pengambilan/pencairan dana KIP dilakukan oleh peserta didik untuk SD,SMP,SMA yang belum mempunyai KTP, mekanisme dalam pengambilan

dana siswa diharuskan memiliki pendamping minimal satu orang guru/orang tua/wali dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar (SD)

- 1) Surat keterangan kepala sekolah
- 2) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata , lengkap dengan nama sekolah dan NISN
- 3) KTP orang tua/wali

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 1) Surat keterangan kepala sekolah
- 2) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata , lengkap dengan nama sekolah dan NISN
- 3) KTP orang tua/wali

c. Sekolah Menengah Atas (SMA)

- 1) Surat keterangan Kepala Sekolah
- 2) Kartu pelajar atau identitas pribadi.
- 3) KTP/Kartu Keluarga orang tua/wali bagi peserta didik yang belum mempunyai KTP.

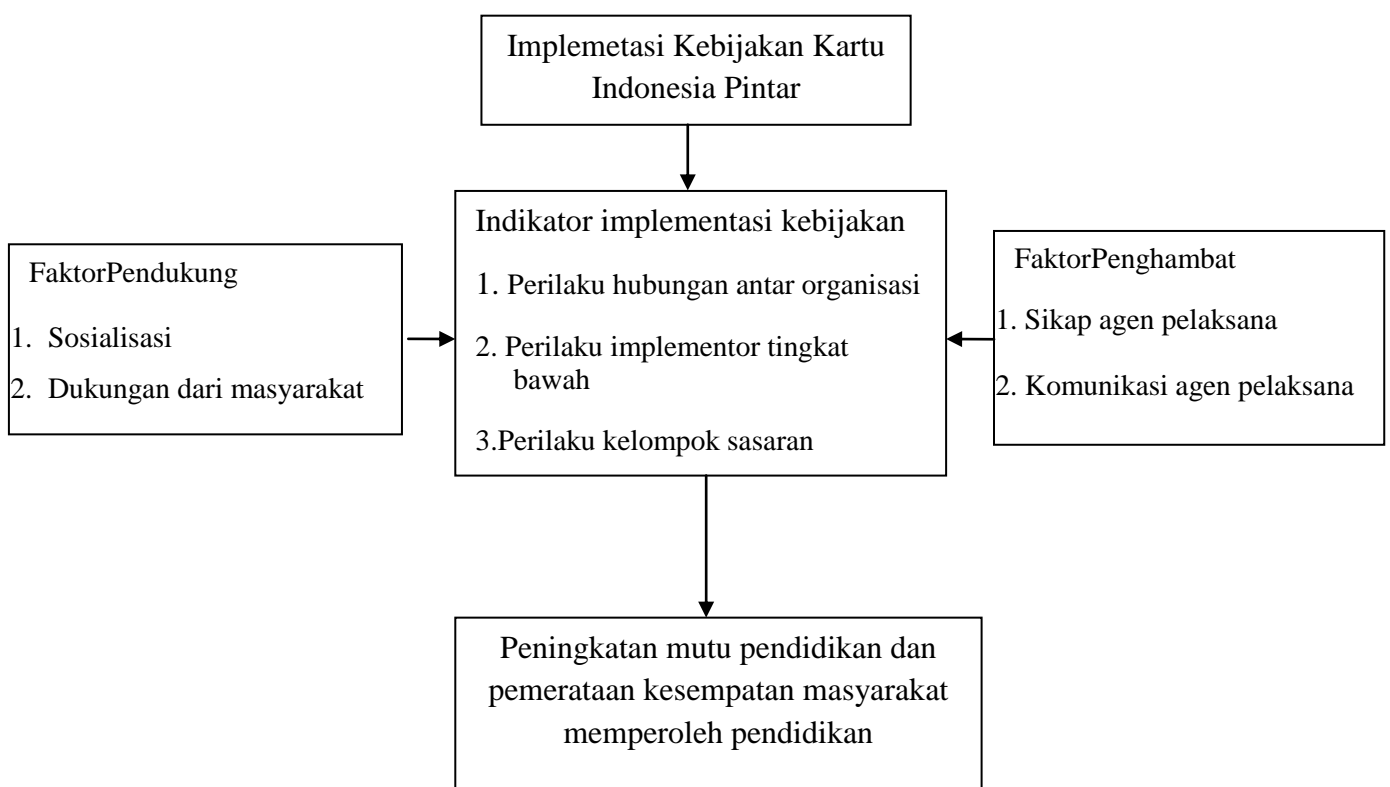
d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- 1) Surat keterangan Kepala Sekolah
- 2) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap
- 3) KTP peserta didik atau KTP orang tua/wali bagi siswa yang belum memiliki KTP.

E. Kerangka Pikir

Pelaksanaan KIP yang diterapkan kepada masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan didukung oleh pengimplementasian dari program tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui implementasi sebuah program KIP di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dengan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan dengan menggunakan tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu (1) Perilaku hubungan antar organisasi, (2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah, dan (3) Perilaku kelompok sasaran, serta faktor pendukung, yaitu (1) Sosialisasi, dan (2) Dukungan dari Masyarakat dan faktor penghambat, yaitu (1) Sikap Agen Pelaksana, dan (2) komunikasi Agen Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan berikut ini:

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu;(1) Perilaku hubungan antar organisasi, (2) Perilaku implementor tingkat bawah, dan (3) Perilaku kelompok sasaran beserta faktor yang mendukung yaitu (1) Sosialisasi, dan (2) Dukungan dari Masyarakat dan Faktor yang menghambat yaitu (1) Sikap Agen Pelaksana dan (2) Komunikasi Agen Pelaksana.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perilaku hubungan antar organisasi: Dimensinya adalah (a) komitmen dan (b) koordinasi antar organisasi.
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah: dimensinya adalah (a) kontrol organisasi dan (b) etos kerja dan (c) norma-norma profesional.
3. Perilaku kelompok sasaran: meliputi(a) respon positif atau (b) negatif masyarakat dalam mendukung dan tidak mendukung suatu kebijakan.
4. Sosialisasi: dimensinya adalah (a) sumberdaya informasi dan (b) sumberdaya peralatan
5. Dukungan dari masyarakat: dimensinya adalah (a) partisipasi masyarakat dan (b) keterbukaan masyarakat
6. Sikap agen pelaksana: dimensinya adalah (a) tenaga pelaksana dan (b) pelaporan dana
7. Komunikasi agen pelaksana: dimensinya adalah (a) aktivitas pelaksana dan (b) penyaluran dana

8. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan masyarakat memperoleh pendidikan, yaitu upaya yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pendidikan dengan tidak membedakan status sosial sehingga anak yang kurang mampu (miskin) juga dapat merasakan pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan 2 bulan setelah seminar proposal. Dengan pertimbangan karena ingin melihat bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Maros.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian terhadap suatu kasus secara intensif serta rinci terhadap suatu latar, satu subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa yang diarahkan untuk

menghimpun data dan mengambil makna mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Maros.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) tentang implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang bersumber dari data yang sudah diolah dalambentuk dokumen, laporan bulanan atau informasi tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian sebagai salah satu sumber data yang penting terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive, yaitu memilih orang – orang yang dijadikan informan karena mereka dijadikan informan yang menjelaskan tentang objek yang diteliti, sebagainya dikembangkan dengan memberikan intruksi yang akurat sesuai tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa

Rompegading sebagai penanggung jawab kebijakan, Staf Kantor Desa Rompegading sebagai pelaksana kebijakan, Kepala Sekolah dan Guru SDN Padangalla sebagai operator dan pelaksana kebijakan, Pegawai Dinas Pendidikan Daerah sebagai penyampai informasi dari pusat dan Masyarakat sebagai penerima bantuan KIP. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel informan sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

| No | Nama | Inisial | Jabatan | Keterangan |
|--------|------------------|---------|------------------------------|------------|
| 1. | Muh. Arfah S.Pd | MA | Kepala Desa Rompegading | 1 orang |
| 2. | Muhaeminul Annur | MA | Staf Desa Rompegading | 1 orang |
| 3. | Nur Aeni S.Pd | NA | KepSek SDN Padangalla | 1 orang |
| 4. | Sitti Judriah | SJ | Guru SDN Padangalla | 1 orang |
| 5. | Herlina S.Sos | HR | Staf Dinas Pendidikan Daerah | 1 orang |
| 6. | Nurlia | NR | Masyarakat | 1 orang |
| 7. | Mariati | MR | Masyarakat | 1 orang |
| 8. | Nursia | NR | Masyarakat | 1 orang |
| 9. | Pajja | PJ | Masyarakat | 1 orang |
| 10 | Nasmawati | NS | Masyarakat | 1 orang |
| Jumlah | | | | 10 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk menggali dan berhubungan langsung dengan masalah yang di kaji dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi penelitian ini mengenai implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabpaten Maros. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara di lakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (interview). Pedoman wawancara perilaku hubungan antar organisasi, dan peilaku implementor, sosialisasi dan (tingkat bawah) diarahkan kepada informan dinas pendidikan, kepala desa, staf desa dan guru sedangkan pedoman wawancara perilaku kelompok sasaran di arahkan kepada informan pihak masyarakat yang memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu tehnik untuk mengambil data dari beberapa buku bacaan maupun dokumentasi dan foto – foto berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang implemengasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pengamatan secara langsung dilapangan sebelum melakukan penelitian

mengenai implementasi kebijakan karu indonesia pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

F. Teknik Analisis Data

Tehnik penelitian menggunakan Data Kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta – fakta yang tidak dapat di ukur dan di hitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan variabel (kalimat dan data) dengan tehnik ini peneliti hanya mengumpulkan data – data, informasi – informasi, fakta – fakta keterangan – keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pendataan untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono (2011), sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah komponen pertama analisis data yang memperpendek, mempertegas, membuat fokus, mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat di lakukan dan menghilangkan hal yang tidak penting.

2. Sajian data (*data display*)

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah di pahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal – hal yang ia temui dengan mencatat peraturan – peraturan sebab akibat dan

berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono, Trigulasi diartikan sebagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2013), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber di artikan sebagai melakukan perbandingan dengan cara mengecek ulang suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang di katakan umum dengan yang di katakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik di artikan sebagai uji keakuratan data di lakukan dengan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan metode/teknik yang berbeda. Misalnya data di dapatkan dengan melakukan wawancara, kemudian di lakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika dengan teknik uji keakuratan data tersebut terlihat hasil datanya berbeda – beda, maka peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk mengetahui data mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda – beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga biasanya dapat mempengaruhi keakuratan data. Data yang di dapatkan melalui teknik wawancara yang di lakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih merasa segar, masih belum menghadapi masalah akan memberikan data yang lebih akurat sehingga akurat. Maka dari itu, dalam rangka uji keakuratan data dapat di lakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi, ataupun teknik lainnya dalam situasi atau waktu yang berbeda. Jika hasil uji terlihat data yang berbeda, maka di lakukan secara berulang – ulang sehingga di temukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga di lakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang di beri tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan wilayah

Kabupaten Maros secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 4.045 hingga 5.007 Lintang selatan, dan 10.920 hingga 12.912 Bujur Timur. Luas kabupaten Maros adalah 1.619,12 km atau 2.3% dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas – batas, yaitu: sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep, sebelah selatan adalah Kota Makassar, sebelah timur adalah Kabupaten Bone, sebelah barat selat Makassar.

Berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, maka daerah pemerintah kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 235,92 km atau 14,57% dari luas wilayah Kabupaten. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Turikale (Ibukota Kabupaten) dengan luas 29,93km (1,85% dari luas wilayah kabupaten). Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih terdapat 22 desa/kelurahan swadaya dan 22 desa/kelurahan swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 desa telah termasuk kategori desa swasembada.

2. Kependudukan

Penduduk kabupaten Maros berdasarkan sensus penduduk tahun 2016 berjumlah 339.300 jiwa, yang terbesar di 14 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 43.778 jiwa yang mendiami kecamatan tirukalle. Secara umum,

keterbandingan laki – laki dengan perempuan (*sex rasion*) perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki – laki dengan perbandingan 45% laki – laki dan 55% perempuan.

Kecamatan Tanralili merupakan wilayah yang rasio jenis kelaminnya paling besar yakni 103, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki – laki dikecamatan tersebut lebih besar dari pada penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan dikecamatan Turikalle dengan jumlah 43.335 jiwa. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa dengan jumlah 11.346 jiwa.

3. Sarana Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya manusia suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial. Di kabupaten Maros dalam upaya meningkatkan pendidikan pemerintah Kabupaten Maros menerapkan berbagai metode salah satunya dengan memanfaatkan teknologi *online*. Perpustakaan *online* merupakan metode praktis yang dilakukan, Kabupaten Maros terdapat beberapa sekolah dengan berbagai jenjang mulai dari SD, SMP dan SMA untuk tingkat SMA/SMK terdapat 36 sekolah, SMP 93 sekolah dan SD sebanyak 225 sekolah.

4. Sarana Kesehatan

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan jalan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah – daerah terpencil. Dapat dilihat pada tabel

statistik kesehatan di kabupaten maros. Jumlah tempat berobat mengalami pengurangan dari tahun ketahun , pada tahun 2001 dan 2012 jumlah tempat berobat yakni 445 unik yang terdiri dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, pustu dan posyandu, kemudian ditahun 2013 mengalami pengurangan menjadi 431 unit dan tahun 2014 juga mengalami pengurangan, sehingga jumlah tempat berobat menjadi 416 unit, lain halnya dengan tenaga kerja yang mengalami peningkatan dari 347 orang ditahun 2012 dan meningkat menjadi 354orang ditahun 2013, selanjutnya tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 375 orang.

4. Gambaran Umum Desa Rompegading

Kondisi geografis Desa Rompegading yang berada di wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dengan memiliki luas wilayah 8,59 KM . Desa Rompegading merupakan salah satu desa dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Adapun batas – batas wilayah Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baji pamai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limappoccoe
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simbang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cenrana Baru

Jarak tempuh udara di Desa Rompegading menuju kabupaten maros adalah 27 KM, namun jika di tempuh dengan jalur darat menjadi 43 KM. Jarak dari Desa Rompegading menuju ibukota Sulawesi Selatan yaitu Makassar adalah 73 KM melalui jalur darat dn jarak dari Desa Rompegading menuju Kabupten

Bone adalah 93 KM. Penghasilan utama dari penduduk Desa Rompegading selain Pegawai Negeri Sipil adalah bertani.

5. Visi dan Misi Desa Rompegading

a. Visi Desa Rompegading

Visi dari Desa Rompegading adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Di mana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

b. Misi Desa Rompegading

Misi dari Desa Rompegading adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan program yang ada sebelumnya
2. Meningkatkan sistem kinerja aparat pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk – bentuk penyelewengan lainnya
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, petani dan wiraswasta
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan mandiri

6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sesuai dengan skill dan kemampuan yang di miliki untuk menopang pembangunan desa yang berkelanjutan.

B. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan siswa yang kurang mampu/miskin, dengan harapan mengurangi beban masyarakat dan anak putus sekolah. Hal yang menjadi indikator dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) Perilaku hubungan antar organisasi, (2) Perilaku implementor (aparatur birokrat) tingkat bawah dan (3) Perilaku kelompok sasaran.

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Perilaku hubungan antar organisasi merupakan perilaku organisasi yang menyangkut aspek –aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di kabupaten maros yang dapat memberikan bantuan yang berupa KIP kepada masyarakat yang kurang mampu atau anak – anak sekolah yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah agar tidak terputus. Adapun dimensi dari perilaku hubungan antar organisasi yaitu : (a) komitmen dan (b) koordinasi antar organisasi.

1.a. Komitmen

Komitmen merupakan sebuah janji pada diri kita maupun pada orang lain, dimana komitmen tersebut akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja dalam menjalankan tugas menuju perubahan yang lebih baik dalam implementasi kebijakan kartu indonesia pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Bantuan dana ini memang untuk siswa miskin lalu dana tersebut dikelola orangtua siswa sendiri dan digunakan dalam membiayai pendidikan anaknya misalnya untuk membeli alat tulis, seragam, les tambahan dan transportasi siswa ke sekolah (Wawancara dengan HR, 10 juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa sesuai komitmen dari pelaksanaan kebijakan ini, KIP memang di tujukan kepada siswa yang tidak mampu untuk membiayai keperluan sekolah misalnya untuk membeli alat tulis, seragam dan transportasi siswa kesekolah.

Bantuan dana ini merupakan lanjutan dari bantuan siswa miskin yang di sempurnakan menjadi kartu program indonesia pintar yang memang harus di kelola oleh orang tua siswa sendiri untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Meskipun di dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah – masalah. Sepertiwawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

“Informasi – informasi yang di sampaikan sudah jelas, meskipun ada masalah – masalah sedikit. Tetapi dalam pelaksanaannya kita sudah sesuai prosedur. (Wawancara dengan SJ, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa sesuai dengan komitmen kami meskipun dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada tetapi dalam penyampaian informasinya masih mengalami masalah – masalah kita tetap melaksanakan implementasi kebijakan ini. Terkait dengan pelaksanaannya, adapun wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa :

“Untuk keberhasilan kebijakannya nanti dapat kita lihat, jadi tidak ada lagi kata yang kita dengar bahwa orang miskin tidak bisa sekolah (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa berhasil atau tidaknya kebijakan yang kita laksanakan kita tetap bersemangat untuk melaksanakannya agar orang miskin juga bisa melanjutkan sekolahnya, Karena target dari kebijakan ini memang di peruntukkan untuk masyarakat miskin. Adapun wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Guru dan Staf kantor desa selalu menemani kami dari awal pendataan penerima KIP sampai dengan pencairan dana (Wawancara dengan NS, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa untuk pendataan sampai pencairan dana masyarakat selalu di dampingi oleh guru di sekolah dan staf kantor desa karena memang yang menjadi pelaksana yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pelaksana dari tingkat desa dan sekolah.

1.b. Koordinasi Antar Organisasi.

Koordinasi antar organisasi merupakan sebuah kegiatan yang rasional oleh sejumlah lembaga atau instansi yang saling berhubungan, koordinasi

merupakan sebuah tali pengikat dalam organisasi yang menghubungkan para aktor yang didalamnya terdapat kerjasama untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan kartu indonesia pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangallayang mengatakan bahwa:

”Mulai dari sebelum dan sesudah KIP dibagikan pihak – pihak dari kantor desa selalu berkoordinasi dengan kami (pihak sekolah) mengenai bantuan dana tersebut, yang kami bicarakan mengenai siswa mana saja yang berhak menerima KIP. (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa staf kantor desa dan staf guru selalu berkoordinasi mengenai bantuan dana kartu indonesia pintar, membahas mengenai siapa saja yang berhak menerima KIP.

Memang sudah seharusnya para pelaksana KIP saling berkoordinasi mengenai penerima bantuan KIP jangan sampai di berikan tidak tepat sasaran. Seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Desa Rompegading yang mengatakan bahwa:

“Kartu Indonesia Pintar memang untuk siswa yang kurang mampu secara materi dan untuk masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP harus berhubungan langsung kepada staf kantor desa. (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa dalam implementasi KIP di desa rompegading kecamatan cenrana kabupaten maros pihak – pihak yang bersangkutan saling berkomunikasi/berhubungan agar penerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) benar – benar tepat sasaran yaitu dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin yang anaknya bersekolah.

Berhubungan dengan suatu kebijakan sudah seharusnya para pelaksana yang terkait di dalam kebijakan tersebut sudah seharusnya saling berkoordinasi agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegadingyang mengatakan bahwa:

“Meskipun dari pihak kecamatan jarang datang ke sini, tetapi koordinasi antara staf kantor desa dan guru di sekolah tetap berjalan. Bagaimanapun jika ada keluhan dari masyarakat setidaknya kita siap untuk membantu. (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa koordinasi antara staf kantor desa dan guru di sekolah tetap berkoordinasi dalam menghadapi keluhan dari masyarakat, meskipun pihak kecamatan tidak datang untuk memberikan informasi kepada pihak kantor maupun sekolah.

Begitupun informasi mengenai pelaksanaan KIP harus tepat waktu agar pelaksanaanya tidak terlambat ataupun mendapat keluhan dari masyarakat. Adapun wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Dinas Pendidikan Daerah yang mengatakan bahwa :

“Di sini saya sebagai fasilitator, penyampai dan pelaksana informasi kepada pelaksana di kantor desa dan sekolah karena kan kebijakan ini dari pemerintah (Wawancara dengan HR, 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa peranan staf dinas pendidikan daerah sebagai fasilitator yaitu menyambung kepentingan pemerintah kepada pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan maupun desa agar kebijakan tersebut berhasil.

2. Perilaku Implementor Tingkat Bawah

Perilaku Implementor Merupakan kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dengan melalui berbagai cara. Dimana kelompok aparat birokrat ini mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi adanya program Kartu Indonesia Pintar dikalangan masyarakat desa yang berada di kabupaten Maros. Adapun dimensinya yaitu : (a) Kontrol Organisasi, (b) Etos Kerja, dan (c) Norma-norma profesional.

2.a. Kontrol Organisasi

Kontrol organisasi merupakan bagian penting dalam sistem manajemen. Kontrol organisasi merupakan suatu mekanisme dari implementasi kebijakan dalam proses kontrol tersebut membantu tingkah laku manusia yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan KIP tersebut untuk tetap fokus mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan rencana.

Bantuan dana kartu indonesia pintar di berikan bukan hanya sekedar untuk memberikan dana kepada masyarakat miskin tetapi harus benar – benar di gunakan untuk kepentingan anak bersekolah untuk itu pelaksana harus tetap mengontrol dana tersebut. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Kantor Desa yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang mendapatkan kartu indonesia pintar harus menggunakannya dengan baik, karena dimana kartu indonesia pintar ini harus tetap di awasi oleh staf – staf desa apakah masyarakat

menggunakannya dengan baik atau tidak. Kadang kami terjun ke lapangan untuk menanyai si penerima KIP bantuan dana yang diterima dipergunakan untuk apa saja. (Wawancara dengan MA,01 Juli 2017)”.

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat di ketahui bahwa kartu indonesia pintar tetap di awasi oleh staf desa yang bersangkutan dan kadang terjun langsung ke lapangan agar masyarakat yang mendapatkan kartu indonesia pintar bisa menggunakannya dengan baik. Pihak sekolah sebagai pelaksana sudah mengontrol para siswa agar dana yang di berikan untuk keperluan sekolah. Adapun wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangallayang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak sekolah selalu mengingatkan siswa yang menerima bantuan dana KIP, karena bisa saja dana tersebut bukan untuk keperluan sekolah, biasanya kami menanyai siswa dana yang diterima di pakai untuk beli perlengkapan sekolah atau tidak(Wawancara dengan SJ 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lakukan diatas dapat diperoleh jawaban bahwa pihak sekolah dan staf kantor desa ikut mengawasi dalam hal penerimaan bantuan dana KIP agar tidak di salahgunakan oleh orangtua siswa. Di dalam pengambilan dananya pun kadang ada masalah yang muncul jadi harus ada salah satu dari pihak pelaksana yang menemani. Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

”Biasanya salah satu dari guru ikut menemani siswa dan orangtuanya ke bank untuk mengambil dana KIPnya karena biasanya ada salah satu dari mereka tidak sabaran bahkan sampai emosi jika kita sudah sampai di bank tapi ternyata dananya belum cair. (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang di lakukan guru SDN Padangalla selaku pelaksana kebijakan yaitu ikut menemani siswa dan orangtuanya pada saat pencairan dana di bank karenabagaimanapun penanggungjawab pelaksana kip di sekolah yaitu kepala sekolah, di lihat dari wawancara yang di lakukan penulis kepada informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa :

“Iya, kalau di sekolah penanggung jawabnya itu kepala sekolah dan ada staf kesiswaannya sekaligus sebagai operator sekolah yang menangani semua hal yang menyangkut KIP di sekolah (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan kebijakan KIP di sekolah yaitu kepala sekolah sedangkan yang mengontrol masalah kebijakan sampai dengan data siswa penerima KIP yaitu guru yang di tunjuk sebagai staf kesiswaan sekaligus sebagai operator sekolah.

Persyaratan pengambulan dana tidak hanya di damping guru tetapi juga harus membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah. Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu informan yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Pencairan dananya kita harus mengambil dulu rekomendasi dari kepala sekolah sudah itu baru kita ke bankmi di antar sama guru (Wawancara dengan MR, 13 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa dalam hal pencairan dana tetap harus tetap mengikuti prosedur salah

satunya yaitu melalui rekomendasi dari kepala sekolah dulu dan di temani oleh guru agar bisa tetap di awasi pengambilan dananya.

2.b. Etos Kerja

Etos kerja merupakan perilaku individu yang baik dalam suatu kelompok yang sedang melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan kartu indonesia pintar didesa rompegading kecamatan cenrana kabupaten maros. Dalam implementasi kebijakan diperlukan sebuah etos kerja dan norma-norma profesional Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan sesuai tujuan.

Perilaku implementor di dalam menjalankan kebijakan juga menunjang keberhasilan dari kebijakan itu. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa:

”Para pegawai yang ada di dalam kantor desa sangat mempedulikan masyarakat dalam pembagian kartu indonesia pintar, Dan juga para pegawai sabar dalam menghadapi masyarakat yang kadang terlalu banyak tanya ataupun yang banyak proses ini itu, minta di percepat pembagian Kartunya.(Wawancara dengan MR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat di simpulkan bahwa sikap para pegawai di kantor desa sangat peduli dan sabar dalam menghadapi keluhan masyarakat dalam membagikan kartu indonesia pintar walaupun sikap masyarakat yang kadang tidak sabaran ingin menerima kartu indonesia pintar.

Bukan hanya implementoryang berperilaku baik di dalam menjalankan kebijakan, tetapi perilaku yang baik juga di tunjukkan dari masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar, terlihat dari wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat yang datang ke kantor entah itu untuk mengambil KIP maupun yang baru mau usul KIP semuanya baik dan sopan jadi yah kita juga bekerjanya enak, membagikan kartu dan mendengar keluhannya juga enak(Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lakukan diatas dapat diperoleh jawaban bahwa dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar para pegawaimelayani masyarakat dengan baik sesuai norma-norma yang ada di dalam masyarakat karena sikap masyarakat yang juga baik dan sopan dalam membagikan kartu sampai dengan pemberian informasi apapun mengenai pemberian bantuan kip. begitupun wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Kantor desa yang mengatakan bahwa:

“Yah begitulah namanya kita pelayan masyarakat yang di amanahkan untuk kepentingan masyarakat, jika ada lagi informasi dari pihak kecamatan kita undang lagi orang tua siswa datang ke sekolah atau kadang dikantor desa (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa para staf desa melakukan tugas dengan baik yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat jika ada informasi dari pihak kecamatan karena mereka merasa di berikan amanah untuk melayani masyarakat walaupun pelaksanaannya terbilang sedikit. Berikut wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaanya di sini hanya sayaselain itu saya juga tetap menjalankan tugas sebagai staf kesiswaan (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa masalah apapun yang di keluhkan dan di laporkan oleh masyarakat ke

sekolah begitupun mengenai data penerima KIP di tangani oleh staf kesiswaan sebagai pelaksana KIP di sekolah.

2.c. Norma-Norma Profesional

Norma profesional yang di maksud dalam implementasi kebijakan KIP yaitu sikap dari pelaksana mengikuti norma – norma yang ada dalam dalam masyarakat dan tidak memihak kepada satu pihak dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa:

“Bagi masyarakat yang merasa berhak menerima KIP tetapi tidak memenuhi kriteria, kami menyarankan untuk melapor ke sekolah atau kantor desa agar dapat di usulkan untuk menerima KIP, karena kami berharap tidak ada lagi anak – anak tidak mampu yang tidak bersekolah (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat disimpulkan bahwasamasyarakat yang tidak menerima KIP tapi merasa berhak menerima KIP bisa di usulkan dengan cara masyarakat datang melapor ke kantor desa atau sekolah. Begitupun dengan wawancara yang di lakukan dengan Staf Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

“Untuk SK pencairan dana kami cari sendiri di website dek, kemudian di download dan di informasikan kepada siswa, walaupun kadang orangtua siswa sudah tau terlebih dahulu dari mulut kemulut tapi kita tetap informasikan ke siswa untuk di sampaikan ke orang tuanya (Wawancara dengan SJ 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa prosedur SK pencairan dana yang sudah di download oleh staf guru

langsung diinformasikan kepada siswa untuk di sampaikan kepada orang tuanya walaupun orang tua siswa sudah tau terlebih dahulu.

Dari wawancara dengan kedua informan di atas terlihat kekonsistenan dari pihak pelaksana mengenai pemberian kesempatan untuk mengusulkan diri sebagai calon penerima kip tetapi tidak dengan penyampain informasi. Informasi terbaru mengenai kebijakan kip sering lebih dulu di ketahui oleh orangtua siswa dibandingkan dengan pihak pelaksana. hal itu juga terlihat dari wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangalla yang mengatakan bahwa :

“Kemarin waktu staf kantor desa membawa data penerima KIP kesini saya sempat protes karena saya lihat dari kesehariannya siswa yang termasuk penerima KIP itu tidak terlihat seperti siswa yang tidak mampu. Makanya saya minta kepada pihak kantor desa agar mengecek dulu keadaan rumahnya seperti apa (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Norma profesional terlihat dari kepala sekolah yang menyarankan untuk memeriksa ulang mengenai data siswa penerima KIP agar bantuan tersebut benar – benar tepat sasaran agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sesama masyarakat, karena saya berharap kebijakan ini dapat di terima dengan baik oleh masyarakat. seperti wawancara yang di lakukan penulis kepada informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Setau saya tidak ada yang menolak kebijakan ini, sejauh ini juga tidak ada masalah yang cukup besar hanya ada masukan dari masyarakat mengenai informasi tentang kip harus lebih cepat di beritahukan kepada masyarakat (Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa terkait profesional dari pelaksana kebijakan KIP sejauh ini masalah yang muncul hanya mengenai bentuk protes dari masyarakat yang berharap penyampaian informasi tidak sering terlambat.

3.Perilaku Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok merupakan sebuah tindakan atau aktivitas masyarakat dalam lingkungannya untuk mendapatkan aspirasi anggota kelompoknya. Jadi perilaku kelompok adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya dalam implementasi kebijakan kartu indonesia pintar diDesa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Adapun dimensinya yaitu : (a) Respon positif masyarakat dan (b) Respon negatif masyarakat.

3.a. Respon Positif Masyarakat

Respon positif masyarakat terhadap adanya KIP merupakan respon yang baik atau bentuk kepuasan oleh masyarakat atas kebijakan KIP, dan KIP juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak – anak yang rawan putus sekoah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan .

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana Kartu Indonesia Pintar ini, apa lagi di Desa Rompegading tingkat pendidikan masih rendah karna faktor biaya sehingga masih banyak anak-anak di desa ini yang tidak bersekolah. Ada yang hanya tamat Sd saja bahkan ada yang belum tamat SD tapi sudah berhenti. (Wawancara MR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti diatas maka dapat diperoleh jawaban bahwa respon baik yang di berikan oleh masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan dana KIP sehingga anak – anak yang tidak bersekolah karena kekurangan biaya bisa melanjutkan bersekolah kembali karena kebanyakan dari masyarakat penerima kip hanya berprofesi sebagai petani yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai sekolah anaknya. Berikut wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Kantor Desa yang mengatakan bahwa :

“Kebanyakan dari orangtua siswa bekerja sebagai petani sehingga kebijakan ini sangat membantu sekali dan banyak juga yang merespon positif kebijakan ini (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa orangtua siswa sangat senang dan merespon positif karena adanya kebijakan ini, terlebih lagi kondisi mereka yang mayoritas petani. hal yang sama pun dikatakan masyarakat yang menerima kip, berikut hasil wawancaranya:

”Terbantu, sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak saya, meringankan juga biaya sekolah. Jadi uang yang biasanya kita gunakan untuk keperluan sekolah anak bisa kita gunakan untuk keperluan lain. Yang dulunya belum bisa beli sekarang sudah bisa beli. (Wawancara dengan NS, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa respon masyarakat yang sangat terbantu karena adanya kartu indonesia pintar yang di berikan beban mereka berkurang, biaya peralatan sekolah tidak menjadi beban lagi, biaya sekolah anak sudah tidak menjadi beban lagi sehingga uang biasa di gunakan untuk keperluan sekolah sekarang bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari- hari. Begitupun hasil wawancara yang di lakukan kepada salah satu informan yaitu masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah dengan adanya KIP ini anak saya semakin semangat dan rajin belajarnya. (Wawancara dengan PJ, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa respon positif juga dapat di lihat dari siswa penerima KIP yang selama mereka menerima bantuan dana KIP minat belajarnya juga bertambah.

3.b. Respon Negatif Masyarakat

Respon negatif masyarakat adalah setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan terhadap suatu rangsangan kepada masyarakat. Dan dimana respon negatif masyarakat bergantung pada jawaban pada stimulus atau merupakan hasil dan individu berperan sebagai pengendali pada implementasi kartu Indonesia pintar (KIP).

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Anak saya sudah tiga kali menerima bantuan dananya, yang pertama sama yang kedua kita ambil di sekolah, tapi ini yang ketiga kita harus kebank lagi. Harusnya dana yang diterima seperti biasanya saja diterima di sekolah supaya kita tidak lama antrinya.(Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa respon yang kurang baik dari masyarakat mengenai pencairan dana yang tidak konsisten. Pengambilan dana yang awalnya di ambil di sekolah kemudian selanjutnya di ambil di bank dan juga pelaksana sering terlambat memberitahukan bahwadananya sudah bisa di ambil. Seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yang juga sebagai penerima KIP yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kadang saya merasa kesal kalau bantuan dananya sudah keluar, karena pihak sekolah tidak memberitahukan. Kadang kita harus bolak balik kebank untuk mengecek, biasanya juga kita tau dari mulut kemulut saja kalau ada salah satu orang tua siswa yang sudah cek ke bank. Sekolah dan kantor desa pun tahunya belakangan. (Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa respon yang kurang baik dari masyarakat yang mengaku kesal dengan tidak adanya informasi mengenai bantuan dana yang sudah di ambil atau belum, masyarakat hanya mendengar dari mulut ke mulut saja, tidak ada kejelasan dari pihak sekolah maupun desa.

Selain pelaksana yang sering terlambat menyampaikan informasi penerimaan dana, keluhan masyarakat juga mengenai penerima kip yang tidak tepat sasaran. Terlihat dari wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa:

”Memang kita yang dapat dana KIP merasa senang. Tetapi kita merasa kasihan kepada masyarakat yang seharusnya berhak menerima dana ini tapi tidak dapat. Sebaliknya ada orang mampu malah terima juga ini dana KIP, setiap hari mengantar anaknya sekolah pake kendaraan pribadi, malah yang jalan kaki ke sekolah karena tidak punya kendaraan pribadi dan jarak rumahnya jauh dari sekolah justru tidak dapat. (Wawancara dengan PJ, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara yang di atas yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa masyarakat merasa penerimaan kartu indonesia pintar di desa rompegading tidak tepat sasaran karena ada orang yang terbilang mampu dari materi menerima dan yang tidak mampu secara materi tidak menerima bantuan tersebut dan yang terlihat tidak mampu secara materi dalam kehidupan sehari –

harinya malah tidak menerima. Sama halnya wawancara yang di lakukan informan kepada Kepala Sekolah SDN Padangalla yang mengatakan bahwa :

“Ada sebagian masyarakat yang protes maunya siswa di buatkan ATM pribadi supaya pada saat pengambilan dana bisa di lakukan kapan saja kalau dananya sudah cair (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara yang di atas yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa respon kurang baik juga di lihat dari kemauan masyarakat yang mau di buatkan ATM pribadi karena tidak ingin kesulitan dalam pencairan dana. Padahal ini adalah kebijakan dari pemerintah menengai struktur pencairan dananya memang sudah sesuai aturan.

C. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

a. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki faktor pendukung yang dapat menunjang pelaksanaan demi keberhasilan kebijakan KIP. Adapun dimensinya yaitu : (1) Sosialisasi dan (2) Dukungan dari masyarakat.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang sangat penting yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya. Sosialisasi dapat di artikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai – nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Maka dapat di katakan seorang individu tidak

pernah melakukan sosialisasi dengan sempurna, ia dapat di ibaratkan sebagai seorang individu yang tidak utuh. Adapun dimensi dari sosialisasi yaitu (a) sumberdaya informasi dan (b) sumberdaya peralatan

1.a. sumberdaya informasi

Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang di sampaikan jelas, sesuai dengan prosedur dan adanya kesamaan persepsi dalam menerima informasi. Informasi yang di maksud terkait dengan KIP adalah mengenai prosedur pelaksanaan, sasaran dan manfaat dana.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

”Kalau dari pihak sekolah pertama kali di sosialisasikan itu pada saat pengambilan rapor siswa karena itu saja biasanya datang semua orangtuanya siswa jadi kita jelaskan apa dan bagaimana itu KIP. Ini yang terakhir kali pertemuan dengan orang tua yang terima dana KIP kita suruh tanda tangan yang sudah terima dananya. (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa sosialisasi di sekolah di lakukan pertama kali pada saat penerimaan rapor siswa karena biasanya semua orangtua siswa datang kesekolah dan pertemuan terakhir kali yaitu penandatanganan penerimaan dana oleh orangtua siswa .begitupun wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa:

”Iya, saya orangtua siswa di panggil, diberitahu tentang persyaratan penerima KIP, begitupun setelah dananya di terima saya di panggil lagi untuk tanda tangan. (Wawancara dengan MR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa setelahdi sampaikan informasi kepada siswa untuk diberitahukan kepada orangtuanya mereka dipanggil ke sekolah untuk bertandatangan sebagai tanda bukti sudah menerima dananya.

Dari kedua wawancara di atas salah satu factor mendukung pelaksanaan kip yaitu sosialisasi yang di sampaikan pada saat pengambilan rapor di sekolah dan pertemuan di kantor desa melalui informasi yang di sampaikan langsung dari kepala sekolah dan kepala desa selaku pelaksana kip. Berikut wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Saya tau KIP awalnya lihat di TV saja tapi pas anak saya masuk SMP dan ada rapat pertemuan orangtua siswa baru saya di informasikan secara langsung mengenai kebijakan KIP (Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa informasi mengenai kepastian bantuan dana KIP juga di sampaikan kepada masyarakat pada saat pertemuan penerimaan siswa baru di sekolah. Begitupun wawancara yang di lakukan peneliti kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padanggalla yang mengatakan bahwa :

“Kita adakan sosialisasi ke sekolah- sekolah pada awal di informasikannya kebijakan ini (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa Rompegading mengadakan sosialisasi kesekolah – sekolah

yang ada di Desa Rompegading baik itu SD,SMP maupun SMA sekaligus memberikan informasi mengenai Kebijakan KIP.

1.b. sumberdaya peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan salah faktor yang mendukung pelaksanaan KIP, di perlukan peralatan yang memadai seperti gedung dan komputer. Sarana pendukung dari pelaksanaan kip di Desa Rompegading yaitu berupa gedung dan juga laptop yang digukana pada saat ada pertemuan. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Kantor desa yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada masalah mengenai tempat untuk melakukan sosialisasi, karena di sini kita punya aula yang kita gunakan setiap ada pertemuan begitupun untuk sosialisasi KIP ini(Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa implementasi KIP jika dilihat dari sumberdaya peralatan yaitu berupa gedung sudah mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.sama halnya wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

“Mengenai fasilitas yang tersedia disini kita punya laptop sendiri jadi dalam pengelolaan data lebih mudah dan juga penyampaian informasi kepada orang tua siswa lebih mudah (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa implementasi KIP jika dilihat dari sumberdaya peralatan yaitu berupa

laptop sudah mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal pengolahan data dan pemberian informasi kepada orang tua siswa.

Selain dari gedung dan laptop sebagai sarana pendukung, juga terdapat buku panduan tentang kebijakan Kartu Indonesia Pintar dan kartu kontrol. Berikut wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangalla yang mengatakan bahwa :

“Sarana penunjang lainnya yaitu ada buku panduan didalamnya ada petunjuk pelaksanaan KIP supaya pihak pelaksana tidak pusing menjelaskan tentang kebijakan KIP (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa sarana lainnya yang diberikan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan KIP yaitu diberikan buku panduan untuk memudahkan pelaksana dalam memberikan informasi. Adapun informasi yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Anak saya di berikan kartu kontrol yang harus di isi pada saat uangnya sudah di gunakan atau di belanjakan (Wawancara dengan MR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa salah satu sumberdaya peralatan yang diberikan kepada siswa yaitu kartu kontrol yang dapat memudahkan orangtua siswa ketika membelanjakan dana yang sudah di terima.

2. Dukungan dari Masyarakat

Dukungan dari masyarakat merupakan partisipasi masyarakat yang mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan

kebijakan yang di rumuskan pemerintah sehingga kebijakan tersebut berhasil dalam pelaksanaannya. Adapun dimensinya yaitu : (a) Partisipasi masyarakat dan (b) Keterbukaan masyarakat

2.a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan yang telah di tetapkan dengan tidak mengorbankan kepentingannya sendiri.

Masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan kebijakan kip. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu GuruSDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

”Setelah di lakukan sosialisasi orangtua siswa datang melapor ke sekolah kalau mereka memenuhi syarat penerima dana KIP. Setelah itu kita suruh lengkapi persyaratan lalu di bawa ke kantor desa untuk di data. (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa orangtua siswa yang merasa memenuhi syarat penerima kartu indonesia pintar datang ke sekolah untuk melapor, lalu mereka melengkapi persyaratan untuk pendataan di kantor desa. Sama halnya wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Biasanya kami orangtua siswa datang ke sekolah atau ke kantor desa, kami memberi masukan seharusnya dana KIP di kelola oleh sekolah saja agar penggunaan dananya tepat sasaran.(Wawancara dengan NS, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa orangtua siswa sangat mendukung kebijakan ini, sehingga meluangkan waktu datang ke kantor desa untuk memberi masukan agar penggunaan dana yang

di berikan benar – benar tepat sasaran. Begitupun wawancara yang di lakukan penulis kepada informan yaitu Staf Kantor Desa Rompegading yang mengatakan bahwa :

“mereka selalu datang bertanya masalah KIP maupun menyiapkan berkas - berkasnya terutama masyarakat yang kurang mampu (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa respon yang positif dari masyarakat sebagai penerima kartu kip dan juga antusias dalam pertemuan untuk membahas masalah pelaksanaan kip. Adapun wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Untuk pertemuan di sekolah biasanya informasi yang diberikan melalui anak saya, kalau dia kesekolah sekalian di beritahu sama guru untuk menyampaikan informasi itu kepada orang tua masing - masing (Wawancara dengan MR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat juga terlihat dari orang tua siswa yang menghadiri pertemuan disekolah walaupun informasinya hanya di sampaikan dari anak mereka.

2.b. Keterbukaan Masyarakat

Suatu kebijakan memerlukan adanya suatu keterbukaan masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Keterbukaan masyarakat dalam menerima pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar terlihat dari wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Meskipun tidak di adakan rapat, biasanya kita saja orang tua siswa yang berinisiatif datang ke sekolah atau ke kantor desa untuk bertanya – tanya mengenai KIP (Wawancara dengan PJ, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa meskipun dari pihak sekolah dan kantor desa tidak melakukan pertemuan khusus dengan masyarakat penerima KIP, masyarakat tetap datang ke sekolah atau ke kantor desa dengan inisiatif mereka sendiri terkait dengan pelaksanaan KIP.

Pendapatan masyarakat yang kecil membuat pelaksanaan kip semakin di sambut baik oleh masyarakat, berikut wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Pendapatan suami saya kecil karena maklum cuma petani, saya berharap agar anak saya bisa seterusnya menerima bantuan ini sampai tamat sekolah.(Wawancara dengan NS, 15 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa masyarakat mendukung kebijakan KIP ini agar terus di lanjutkan sehingga bisa memberikan manfaat yang positif dan meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sama halnya wawancara yang penulis lakukan dengan infroman yaitu masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Karena saya merasa anak saya berhak menerima KIP makanya saya mengajukan diri ke kantor desa untuk jadi penerima KIP juga (Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa keterbukaan masyarakat akan kebijakan ini sangat baik yaitu langsung mengajukan diri ke kantor desa sebagai calon penerima KIP karena merasa dirinya berhak untuk bantuan dana tersebut.

Tidak hanya antusias dalam menyiapkan persyaratan sebagai penerima kip tetapi juga antusias dalam menyampaikan masalah yang di hadapi terkait bantuan dana Kartu Indonesia Pintar. Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan informan yaitu Staf Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa :

“Kami juga senang karena apapun yang menjadi masalah mereka mengenai KIP, mereka langsung datang kesini untuk menyampaikan masalah yang dialami (Wawancara dengan SJ, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa masyarakat sangat terbuka mengenai masalah yang di hadapi terkait kebijakan KIP yang bahkan langsung datang kesekolah untuk berkonsultasi dengan pihak pelaksana KIP.

b. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya, faktor – faktor ini harus di hadapi dalam implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun dimensinya yaitu : (1) Sikap agen pelaksana dan (2) Komunikasi agen pelaksana

1. Sikap agen Pelaksana

Sikap agen pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan implementasi kebijakan, khususnya yang di terjemahkan ke dalam program di mana implementor terlibat secara langsung. Jika implementor setuju dengan ketentuan dan prosedurnya, maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati dan maksimal, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan/program tersebut, maka implementasi program akan

mengalami banyak masalah dalam disposisi. Adapun dimensinya yaitu (1) tenaga pelaksana dan (b) pelaporan dana

1.a. Tenaga Pelaksana

Tenaga pelaksana yang di maksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjadi pelaksana di dalam pelaksanaan kebijakan kartu indonesia pintar.

Pelaksana kebijakan di tingkat desa dan sekolah membuat pelaksana kuwalahan dalam membagi tugas dan pekerjaan sehari – hari di luar tanggungjawab sebagai pelaksana kip, Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangallayang mengatakan bahwa:

“Pelaksana kebijakan ini terbilang sangat kurang, jadi pekerjaan saya juga bertambah, saya yang sebagai operator dan saya juga sebagai pelaksananya. (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa pelaksana kebijakan kartu indonesia sangatlah kurang sehingga guru di sekolah yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan merasa pekerjaannya bertambah banyak di bandingkan waktu sebelum adanya kebijakan ini. Sama halnya wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa:

“kalau untuk di kantor ini saja hanya ada dua orang yang yang khusus melayani KIP, kadang staf di sini merasa kuwalahan dalam menghadapi masyarakat yang datang kesini (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa kurangnya pelaksana KIP membuat para staf kualahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugasnya di kantor. Begitupun

wawancara yang di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangalla yang mengatakan bahwa :

“Mau bagaimana lagi pelaksana yang di tunjuk di sini hanya satu orang, jadi bagaimana bisa mengawasi langsung ke rumah siswa, di sekolah saja sudah banyak pekerjaan yang di kerjakan (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa kurangnya tenaga pelaksana mengakibatkan sulitnya mengawasi secara langsung ke rumah siswa mengenai penggunaan dana oleh orangtua siswa.

Kurangnya pelaksana kebijakan menyebabkan sulitnya dalam melalukan pengawasan penggunaan dana. Seperti wawancara di lakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Desa Rompegading yang mengatakan bahwa :

“Saya lihat kalau di daerah lain sanksi yang di berikan jika dananya di salahgunakan atau melanggar ketentuan di coret namanya dari penerima KIP. Tetapi kita di sini tidak ada pengawas khususnya jadi kita sulit mengawasi penggunaannya (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa tidak adanya pengawas khusus yang di kirim dari pemerintah membuat pengawasan sulit di lakukan, dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan dana tidak ada.

1.b. Pelaporan Dana

Pelaporan dana yang di maksudkan adalah melaporkan hasil penggunaan dana agar bantuan yang di berikan benar – benar di gunakan dengan sebagai mana mestinya karena bias saja dana yang di berikan bisa di salahgunakan, di belanjakan bukan untuk keperluan siswa sekolah tetapi di gunakan untuk membeli

beras dll. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Desa Rompegading yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya kebijakan ini harus ada pengawas khususnya, karena sangat rumit untuk mengawasi penggunaan dananya, bisa saja orangtua siswa tidak menggunakan dana yang di terima untuk keperluan sekolah melainkan untuk keperluan sehari – hari. (Wawancara Dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa karena tidak adanya pengawasan khusus, maka sangat sulit melakukan pengawasan dana yang telah di terima oleh orangtua siswa, hal yang di takutkan jika dana tersebut digunakan untuk keperluan lain bukannya untuk keperluan sekolah anaknya.

Salah satu bentuk pelaporan dana yang sesuai yaitu memberikan kwitansi setiap membelanjakan dana tersebut. Berikut wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Staf Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

“Kalau dananya sudah cair kita minta siswa bawa itu kwitansi dari penggunaan dana dari orang tuanya tetapi tidak semua siswa bawa kwitansi yang kita minta (Wawancara Dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa setelah pencairan dana dan di belanjakan oleh orang tua siswa, siswa di minta agar membawa kwitansi belanjaan orangtuanya kesekolah untuk di perlihatkan kepada staf guru atau kepala sekolah sebagai bukti pembelanjaan dananya benar – benar di gunakan dengan tepat. Begitupun wawancara yang di

lakukan kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangalla yang mengatakan bahwa :

“Harus ada laporan ke kita, harus memperlihatkan kwitansi penggunaan dananya juga, karna kalau tidak ada laporannya kita yang di tegur dari kantor desa (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana dengan memperlihatkan kwitansi harus tetap di lakukan oleh penerima KIP karena akan di jadikan laporan oleh pihak sekolah kepada kantor desa sebagai bukti, tetapi jika kita meminta kwitansi kepada orangtua siswa ada saja alasannya. Seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“kita di tanya – tanya, biasanya juga di mintai kwitansinya. Tapi rasanya susah kalau setiap belanja harus minta lagi kwitansi dari penjual. (Wawancara Dengan MR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa yang pelaporan dana dalam bentuk kwitansi menjadi alasan orang tua siswa tidak datang ke sekolah untuk bertanda tangan ketika sudah menerima dana karena mereka tidak di berikan kwitansi ketika berbelanja.

2. Komunikasi agen pelaksana

Komunikasi agen pelaksana merupakan sesuatu yang cukup sulit. Dalam meneruskan pesan – pesan ke bawah atau dari unit pelaksana ke pelaksana yang lainnya, para komunikator bisa saja menyimpangkan atau menyebarluaskannya, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Adapun dimensinya yaitu :(1) Aktivitas pelaksana dan (2) Penyaluran dana

2.a. Aktivitas Pelaksana

Aktivitas pelaksana adalah usaha –usaha yang di laksanakan untuk melakukan semua rencana yang telah di tetapkan dengan di lengkapi segala kebutuhan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan dan bagaimana cara yang harus di lakukan.

Kurangnya perhatian dari pihak pelaksana juga menghambat pelaksanaan kip, sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangallayang mengatakan bahwa :

“Tidak ada rapat atau apapundi tingkat kecamatan, kita juga tidak pernah di undang mengenai pemberian bantuan kartu indonesia pintar, hanya ada pedoman yang di berikan. Jadi kadang kita bingung mau jawab apa kalau ada masyarakat yang banyak bertanya (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa karena tidak adanya pertemuan khusus dalam membahas kebijakan kartu indonesia pintar, pihak pelaksana di kantor desa belum sepenuhnya mengetahui dan kadang juga bingung jika banyak pertanyaan – pertanyaan dari masyarakat mengenai kartu indonesia pintar karena pedoman yang di berikan dari kecamatan hanya mengenai syarat penarima kartu indonesia pintar saja. Sama halnya wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa :

“Sangat kurang perhatian pelaksana dari tingkat atas, maka dari itu informasi yang harusnya di sampaikan kepada masyarakat sering terlambat. Bahkankadang – kadang orangtua siswa yang lebih dulu tau informasinya (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa keterlambatan informasi yang di sampaikan pihak pelaksana di kantor desa maupun dari sekolah di karenakan kurang perhatian dari pihak kecamatan maupun dari dinas pendidikan daerah yang membuat masyarakat terlebih dahulu mengetahui informasi dibandingkan pihak pelaksana. Begitupun wawancara yang di lakukan penulis kepada informan Staf Desa Rompegading yang mengatakan bahwa :

“banyak kendala yang kita hadapi, terkadang ada masyarakat yang malu atau tidak mau di katakan sebagai keluarga yang tidak mampu sehingga mereka gengsi untuk melapor sebagai penerima KIP (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan KIP kendala yang di hadapi pelaksana yaitu sebagian dari masyarakat sebenarnya berhak menerima bantuan KIP karena di lihat dari segi materi sehari – hari kurang mampu tetapi tidak mau di katakan sebagai orang yang tidak mampu dan gengsi untuk melapor ke sekolah agar di usulkan sebagai calon penerima KIP.

Karena kurangnya kounikasi antar pelaksana menimbulkan masalah pada pengambilan dana di bank. Adapun wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Kalau kita kebank mau ambil dana KIP antriannya cukup panjang. Harusnya ada pegawai khusus yang melayani untuk penerima dana KIP(Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa tidak adanya komunikasi antar pihak membuat masyarakat penerima KIP merasa kurang nyaman karena tidak adanya pegawai bank yang khusus untuk

melayani penerima KIP sehingga membuat antrian yang panjang pada saat pencairan dana.

2.b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang di maksud dalam komunikasi agen pelaksana adalah bagaimana dana yang di berikan dengan komunikasi dari berbagai pihak dapat tersalurkan dengan benar dan tepat sasaran tidak hanya di bagikan secara cuma – cuma tapi di harapkan dapat benar – benar bermanfaat sebagaimana mestinya.

Salah satu yang menjadi factor penghambat pelaksanaan kip dalam hal penyaluran dana yaitu kurangnya komunikasi dari para pelaksana. Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Guru SDN Padangalla yang mengatakan bahwa:

“Kalau sudah waktunya terima dana yah kita langsung ke bank saja tidak ber komunikasi dulu dengan pihak bank, tidak ada penyampaian juga dari pihak kantor desa karena kita kira dananya sudah cair, ternyata pas sampai bank kita antrinya lama dan dananya belum cair. (Wawancara dengan SJ, 04 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa tidak adanya komunikasi dari berbagai pihak sehingga pada saat pengambilan dana tidak sesuai harapan masyarakat.Sama halnya wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Sekolah SDN Padangallayang mengatakan bahwa:

“Memang harusnya seperti itu, setelah mengambil uang di bank wali siswa harus melaporkan kesekolah begitupun setelah membelanjakan uangnya (Wawancara dengan NA, 06 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa tidak adanya pengawas khusus penggunaan dana membuat para orang tua

siswa tidak menghiraukan untuk melapor ketika sudah mengambil dana di bank. Begitupun wawancara yang dilakukan penulis kepada informan yaitu Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Awalnya dana yang anak saya terima diambil di sekolah kenapa selanjutnya di ambilnya di bank, harusnya di sekolah saja lebih cepat dan tidak harus antri lagi sampai setengah hari (Wawancara dengan NR, 13 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pelaksana kebijakan KIP tidak berjalan dengan baik yang membuat masyarakat tidak nyaman dengan ketidak konsistenan tempat pencairan dana.

Kurangnya komunikasi juga menyebabkan keleluasaan adanya peluang penyalahgunaan dana, terlihat dari wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Rompegading yang mengatakan bahwa:

“Sampai sekarang belum ada sanksi tegas untuk penerima bantuan dana KIP jika menyalah gunakan dananya, itupun kalau ketahuan kami cuma tegur biasa saja karena belum ada juga perintah dari atas mengenai sanksi itu. (Wawancara dengan MA, 01 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa setelah dana di cairkan penggunaan dana yang salah belum ada sanksi yang diberikan karena dari pihak kecamatan belum memberikan informasi kepada pihak kantor desa maupun sekolah mengenai sanksi tegas bagi masyarakat yang menyalahgunakan dana tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dilihat dari indikator (a) Hubungan antar organisasi, komitmen dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik yaitu staf kantor desa dan guru di sekolah selalu melakukan berkoordinasi. Di lihat dari (b) Perilaku implementor tingkat bawah, kontrol organisasi, etos kerja dan norma – norma profesional juga berjalan dengan baik terlihat dengan kepedulian dan sikap yang baik dari pelaksana kebijakan KIP. dan (c) Perilaku kelompok sasaran, yaitu adanya respon positif dari masyarakat yang merasa senang dan terbantu dengan adanya bantuan dan KIP serta respon negatif dari masyarakat yang merasa bahwa pemberian bantuan dana KIP tidak merata dan tidak tepat sasaran.
2. Faktor yang mendukung dalam Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yaitu: (a) Sosialisasi yang di sampaikan pada saat ada pertemuan di kantor desa dan penerimaan rapor siswa di sekolah dan didukung dengan peralatan yang memadai seperti gedung untuk pertemuan dan laptop. (b) Adanya Dukungan dari masyarakat berupa partisipasi dan keterbukaan yang mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan kebijakan dari pemerintah sehingga kebijakan tersebut berhasil dalam

pelaksanaannya. Sedangkan faktor yang menghambat dalam Implementasi KIP di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yaitu: (a) Sikap agen pelaksana, tenaga pelaksana kebijakan terbilang sangat kurang sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan dan pelaporan penggunaan dana, dan (b) Komunikasi agen pelaksana, aktivitas pelaksana kurang maksimal di sebabkan kurangnya perhatian dari pelaksana tingkat atas sehingga informasi penyaluran dana tidak tepat waktu.

B. SARAN

1. Kiranya mekanisme yang berubah di setiap periodenya dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Kiranya pemerintah membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar dalam pelaksanaannya agar dana yang di berikan tidak di salah gunakan.
3. Hendaknya pemerintah lebih memberikan kewenangan yang lebih luas pada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
4. Kiranya sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan insentif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing sehingga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.
5. Hendaknya sekolah dapat mengelolah data, arsip, atau dokumen mengenai kebijakan KIP sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggung jawabkan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, William, N 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjamada University.
- Effendi, Sofyan 2001. *Analisis Kebijakan Publik*, Modak Kuliah MAP. Yogyakarta: Gadjamada University.
- Hamidi, Jazim. 2011. Paradigma baru pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda keterbukaan Informasi publik). Malang. *Jurnal Hukum* Vol 18 No. 3: 336-363
- Huda, Ni'matul, dan Nazriyah, R. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Muhammad Saroni. 2013 *Pendidikan Untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan Dalam Kesempatan Berpendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Ndara, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Peters, B. Guy and Jon Pierre. 2003. *Handbook of Public Administration*. SAGE Publications: London.

- Putra, Fadilah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pusat Bahasa. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia online. <http://kmbahasaonline.org>.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Teori dan Perilaku Organisasi*, Malang: UIN. Malang Press.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Surmayadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Septiani Astuti, Rini. 2016. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*, Yogyakarta: Yogya Pustaka.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Public dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Cetakan Keempat. Bumi Aksara: Jakarta.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.

Winarmo, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Perundang-Undangan

UUD 1945 pasal 31 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasl 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588



Nomor : 0637/FSP/A.1-VIII/VI/1438 H/2017 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Sartika
St a m b u k : 10561 04534 12
J u r u s a n : Ilmu Administrsi Negara
Lokasi Penelitian : Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros
Judul Skripsi : ***“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 Juni 2017

D e k a n,
Ub. Pembantu Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 8 9 6 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8812/S.01P/P2T/06/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 981/Izn-05/C.4-VIII/VI/37/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SARTIKA**
Nomor Pokok : 10561 04534 12
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI ROMPEGADING KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Juni s/d 17 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 15 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 15-06-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jendral Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kab. Maros Kode Pos 90516
e-mail : bkppm@maroskab.go.id Web : kesbangpol.maroskab.go.id

Maros, 19 Juni 2017

Nomor : 070 /513/ KesbangPol
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Ka.Desra Rompegading Kec. Cenrana
Kab. Maros
Di -
Maros

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 8812/S.01P/P2T/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal tersebut diatas, Mahasiswi/peneliti dibawah ini:

Nama : **Sartika**
Tempat, tanggal lahir : Maros, 02 Mei 1994
Alamat / Hp : Dusun Moncongjai Desa Rompegading Kec. Cenrana / 082292666682
Jenis Kelamin : Perempuan
No.KTP /SIM : 7309104205940002
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
No.Pokok : 105610453412
Bermaksud melakukan izin penelitian /Pengambilan Data di daerah /kantor Saudara dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI DESA ROMPEGADING
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS”**

Yang di Laksanakan : Tanggal 17 Juni s/d 17 Agustus 2017
Pengikut : -

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut melaporkan diri kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
2. Penelitian /Pengambilan Data dimaksud tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah;
3. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Draft Proposal Penelitian /Pengambilan Data di maksud kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
5. Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ditanggung oleh bersangkutan;
6. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol selambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian Rekomendasi Penelitian/Pengambilan Data ini untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya

a.n. **KEPALA**
Sekretaris

M. H. YUSUF, SE
Pangkat : Pembina Tk I
196012311994031079

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Maros (sebagai laporan) ;
2. Kepala Inspektorat Kab.Maros di Maros ;
3. Ka.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Maros di Maros ;
4. Camat Cenrana Kab. Maros di Maros;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



SARTIKA, lahir di Camba pada tanggal 02 Mei 1994, anak kedua dari tiga bersaudara, dari Baharuddin dengan Darmawati. Penulis mulai memasuki dunia pendidikan formal yaitu pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN 27 Padangalla dan tamat pada tahun 2006, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP 25 Cenrana tamat tahun 2009, pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA 12 Cenrana dan tamat tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) Program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberi manfaat. Dan pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”